

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Istilah “bank” berasal dari kata Italia *banco* yang berarti “kepingan papan tempat buku”, sejenis “meja”. Kemudian penggunaannya lebih diperluas untuk menunjukan “meja” tempat penukaran uang, yang digunakan oleh para pemberi pinjaman dan para pedagang valuta di Eropa, pada abad pertengahan untuk memamerkan uang mereka . dari sinilah awal mula timbulnya perkataan bank.<sup>1</sup>

Bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjam uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman rasulullah.<sup>2</sup>

Sistem perbankan di Indonesia dilaksanakan dengan *dual banking system* dimana sistem ini terbagi atas dua yaitu konvensional dan syariah. Sistem ini mulai ada setelah lahirnya UU No.10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan. Sistem ini menjadi pelopor lahirnya bank syariah di Indonesia.

---

<sup>1</sup>Muhamad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Islam*, (Jakarta: Renika cipta, 2004) h.1

<sup>2</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* Edisi IV, (Jakarta: Rajawali Pers), h.18

Sistem bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan,  
bank konvensional dalam operasionalnya sangat tergantung pada suku bunga yang



berlaku, karena keuntungan utama bank konvensional berasal dari selisih antarbunga pinjam dengan bunga simpan. Sedangkan bank syariah dalam operasionalnya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usahapokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dengan lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasionalannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.<sup>32</sup>

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia tidak akan terlepas dari peranan dan kebijakan bank Indonesia.<sup>33</sup> Perbedaan pendapat tentang bunga bank cenderung mempengaruhi sikap umat muslim Indonesia pada penggunaan jasa perbankan konvensional. Namun, komisi fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah merekomendasikan pemberian bunga bank sebagai hukum riba.

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain berupa prinsip bagi hasil.<sup>34</sup> Diantara dampak ekonomi riba adalah dampak inflator yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah

---

<sup>32</sup> Muhammad, *bank syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.1

<sup>33</sup> Andri Somantri, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2009), h.58

<sup>34</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU NO.21 Tahun 2008)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009)

satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi harga yang akan ditetapkan suatu barang.<sup>35</sup>

Pembagian hasil usaha dengan ketentuan nisbah pihak penyalur dana(*investor*) dan penerima dana usaha (*debitur*). Sehingga besarnya keuntunganyang diperoleh dipengaruhi oleh hasil usaha yang digunakan.Mekanisme bagi hasil menjadi salah satu ciri atau karakteristik perbankan syariah, dimana bagi hasil ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat bisnis, khususnya masyarakat perbankan untuk terhindar dari bunga atau riba. Hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Al Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 275, dimana Allah SWT mengharamkan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur-unsur ribawi, karena unsur tersebut tidak mendatangkan kemaslahatan bahkan hanya bisa mendatangkan keburukan, sehingga sedini mungkin harus dihindarkan.

Konsep bagi hasil juga berindikasi jangka panjang sehingga akan mempunyai kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan.<sup>36</sup> Bagi hasil dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai sebuah hubungan kerjasama antara pihak bank (mitra) dengan pihak nasabah (mitra), dan nantinya akan ada pembagian hasil sesuai dengan persentase jatah bagi hasil (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan ke dua belah pihak.

---

<sup>35</sup> Muhammad syafi'i antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h.67

<sup>36</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.18

Besarnya nominal yang diterima tentunya menyesuaikan dengan besarnya keuntungan yang diperoleh usaha yang dikelola bersama. Konsekuensi dari konsep ini adalah jika hasil usaha menunjukkan keuntungan yang besar, maka bagi hasilnya pun akan besar dan sebaliknya jika keuntungan kecil atau bahkan merugi maka pihak peminjam harus ikut pula menanggung kerugian tersebut.<sup>37</sup>

*Musyarakah* (*syirkah* atau serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi *Musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya.

*Fatwa DSN – MUI tentang bagi hasil dengan cara musyarakah ditetapkan dengan nomor 08/DSN – MUI / IV / 2000 Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa bagi hasil dengan cara musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.*<sup>38</sup>

Salah satu lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa perbankan syariah yang mengimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada

---

<sup>37</sup> Muhammad, *loc.cit.*, h.18

<sup>38</sup> Himpunan Fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI No:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Musyarakah*

masyarakat yaitu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buah Batu yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut BSM KCP Buah Batu.

Kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, misalnya dari lembaga keuangan bank syariah dalam bentuk pembiayaan bagi hasil (*syirkah*), yakni pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.<sup>39</sup>

*Musyarakah* merujuk pada kemitraan usaha patungan syariah dimana bank dan nasabah sepakat untuk menggabungkan sumber daya keuangan demi menjalankan dan mengelola satu usaha bisnis sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Laba dibagi sesuai dengan nisbah, sementara kerugian dibagi secara proporsional sesuai dengan jumlah modal yang disumbangkan masing-masing mitra.<sup>40</sup>

Pembiayaan Dana Berputar adalah salah satu produk BSM KCP Buah Batu yang menggunakan akad *musyarakah*, Pembiayaan Dana Berputar itu sendiri memiliki pengertian yaitu, Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah, yang bertujuan untuk

---

<sup>39</sup> Muhammad syafi'i antonio, *op.cit.* h.90

<sup>40</sup> Daud Vicari Abdullah, *Buku Pintar Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zaman), h.235

kebutuhan *cash flow* yang cepat, pembiayaan ini memberikan plafond atau limit kepada nasabah dan dapat ditarik/dilunasi selama periode pembiayaan.<sup>41</sup>

Pelaksanaan yang dilakukandalam produk Pembiayaan Dana Berputar di BSM KCP Buah Batu yaitu dengan menggunakan akad *musyarakah*, bank menetapkan bagi hasil di akhir periode atau di akhir bulan kepada nasabah atas pembiayaan yang telah diberikan. Namun sebelumnya bank juga menetapkan standarisasi keuntungan yang harus dibayar oleh nasabah atau bisa dikatakan *expected return*/keuntungan yang diharapkan.<sup>42</sup>

Contoh kasus :

Ahmad mengajukan pembiayaan di BSM dengan Pembiayaan Dana Berputar sebesar Rp. 200.000.000 .

$expected\ return = \text{Limit plafon pembiayaan} \times 10 \%$

$= \text{Rp. } 20.000.000$

*Realisasi* standar pendapatan nasabah perbulan harus Rp. 20.000.000. apabila kurang maka nasabah harus menambahkannya.

Dalam produk Pembiayaan Dana Berputar ini ada ketimpangan antara bank dan nasabah, ketika nasabah mendapatkan keuntungan di atas *expected return* dari usaha yang dijalankan maka bank mendapatkan keuntungan lebih.

---

<sup>41</sup>Hasil wawancara dengan Account Officer Bank BSM KCP Buah Batu Bandung

<sup>42</sup>Dokumentasi Bank Syariah, *Nota Pembiayaan Dana Berputar*

Tetapi sebaliknya, jika sebuah usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka pihak nasabah tetap harus membayar *expected return* yang ditetapkan oleh bank, dan bank tidak mengalami kerugian seperti yang dialami oleh nasabah.

Akad *musyarakah* dalam produk Pembiayaan Dana Berputar di BSM KCP Buah Batu nampaknya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*. Dengan adanya standar jumlah uang yang harus dikembalikan oleh nasabah di akhir periode (*expected return*) dan harus dibayar meskipun usaha nasabah mengalami kerugian. Sedangkan dalam *musyarakah* Setiap keuntungan seharusnya dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh dari keuntungan, tidak boleh ada keuntungan yang ditentukan. Sedangkan apabila mengalami kerugian harus dibagi secara proporsional pula sesuai saham masing-masing dalam modal.

Mengenai ketidakbolehan hal di atas, Ismail menyatakan syarat pembagian kerugian/keuntungan *expected return* ialah :

- 1) Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan.
- 2) Pembagian keuntungan harus jelas dan tertuang dalam kontrak. Bila terjadi kerugian, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.<sup>43</sup>

Adapun pelarangan bank menentukan *expected return*, menurut Usmani yang dikutip dari buku Ascarya, syarat Pembagian Kerugian yaitu: “Para ahli

---

<sup>43</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.11



hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh karena itu, jika seorang mitra menyertakan 40 persen modal, maka dia harus menanggung 40 persen kerugian, tidak lebih dan tidak kurang. Apabila tidak demikian, akad *musyarakah* tidak sah.”<sup>44</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Pada pelaksanaan akad *musyarakah* dalam produk Pembiayaan dana berputar di BSM KCP Buah Batu banyak manfaatnya, salah satunya membantu nasabah yang membutuhkan pembiayaan di dalam usaha yang akan atau sedang dijalankannya, akan tetapi bank menentukan *expected return* sebagai penghasilan yang harus diterima oleh bank, tanpa melihat keuntungan riil yang didapat oleh nasabah dan dengan adanya standarisasi bagi hasil (*expected return*) tersebut, maka bank sudah bisa menentukan *profit* meskipun keuntungan nasabah belum jelas. Sedangkan dalam *musyarakah* seharusnya setiap keuntungan dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh dari keuntungan, seharusnya tidak boleh ada keuntungan yang ditentukan.

Dari pernyataan diatas, dapat ditarik beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *musyarakah* dalam Pembiayaan Dana Berputar di BSM KCP Buah Batu?
2. Bagaimana mekanisme penentuan *expected return* pada akad *musyarakah* dalam Pembiayaan Dana Berputar di BSM KCP Buah Batu?

---

<sup>44</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) h.53-59

3. Bagaimana harmonisasi Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dengan penentuan *expected return* pada pelaksanaan akad *musyarakah* di BSM KCP Buah Batu?

### C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang sebagaimana dipaparkan di atas, maka peneliti menyimpulkan dan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *musyarakah* dalam Pembiayaan Dana Berputar di BSM KCP Buah Batu
2. Untuk mengetahui mekanisme penentuan *expected return* pada akad *musyarakah* dalam Pembiayaan Dana Berputar di BSM KCP Buah Batu
3. Untuk mengetahui harmonisasi produk pembiayaan dana berputar dengan akad *musyarakah* di BSM KCP Buah Batu dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000

### D. Kerangka Pemikiran

*Musyarakah* adalah kemitraan dalam suatu usaha, dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka, untuk berbagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama.<sup>45</sup> Dan juga suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan

---

<sup>45</sup>Latifa M. Algoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah Prinsip dan Praktek (Terjemahan Burhan Wirasubrata)*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), h.69

kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>46</sup>

Ayat Al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan tentang *musyarakah* adalah sebagai berikut:

Q.S. Shad [38]: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ لِسُؤَالٍ نَعَجْتِكِ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَلَسْتُغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا

وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

24. Daud berkata: Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.<sup>47</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*, diantaranya adalah:

1. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

<sup>46</sup>Muhammad syafi'i antonio, *op.cit.* h.90

<sup>47</sup>Semua terjemahan ayat Al-Quran dalam tulisan ini dikutip dari Seonarjo dkk. (2009: 933)

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
  - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
    - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang,

properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini dia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.

- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

- 1) Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>48</sup>

Salah satu rukun yang khas dalam akad *musyarakah* adalah keuntungan sesuai proporsional. Menurut Adiwarman Karim, nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermusyarakah. *Musyarik* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan, adapun *nisbah* keuntungan harus dinyatakan dalam

---

<sup>48</sup>Himpunan Fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI No:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Musyarakah*

bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu.<sup>49</sup>

Beberapa asas muamalah yang perlu dilakukan dalam setiap transaksi muamalah adalah:

#### 1. Asas *Tabadul al-Manafi*

Bahwa segala transaksi harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi para pihak yang terlibat. Asas pertukaran manfaat (*tabadu al manafi*) direduksikan dari Surat Al-Imran ayat 191.<sup>50</sup>

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ١٩١

191.“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka”.<sup>51</sup>

Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Dengan masalahat dimaksudkan memenuhi dan

---

<sup>49</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.206

<sup>50</sup>Abdul Hakim dan Atang, *Fiqh Perbankan Syariah (Transformasi Fiqh Muamalah Ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h.160

<sup>51</sup>Semua terjemahan ayat Al-Quran dalam tulisan ini dikutip dari Seonarjo dkk. (2009: 156)

melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan.

## 2. Asas Pemerataan

Prinsip pemerataan dalam tataran ekonomi menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola dan menikmati sumber daya ekonomi sesuai dengan kemampuannya. Hubungan muamalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut.<sup>52</sup>

## 3. Asas Kerelaan

Melakukan perjanjian bisnis harus dilakukan dengan cara saling suka sama suka atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa kecewa.

Hal ini disebutkan dalam Surat An-Nisa ayat 29. Asas kerelaan merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara

---

<sup>52</sup>Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM UNISBA, 1995), h.113-115



formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak.

#### 4. Asas *'adam al-gharar*

*Gaharar* mengandung unsur spekulasi bahkan penipuan yang dapat menghilangkan *'an tar<sup>-</sup>adhin*. *'Adam al-gharar* mengandung arti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada unsur *gharar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga menyebabkan hilangnya unsur kerelaan dalam melakukan suatu transaksi.<sup>53</sup>

#### 5. Asas *al-Bir wa Taqwa*

Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling tolong menolong antara sesama manusia yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain, muamalah yang bertentangan dengan kebajikan dan ketakwaan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketakwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.<sup>54</sup>

#### 6. Asas *Musyarakah*

Asas *musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah merupakan *musyarakah* yakni kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan. Asas ini melahirkan dua bentuk pemilihan yaitu: pertama, milik pribadi dan perseorangan, yakni harta atau benda dan manfaat yang dimiliki

---

<sup>53</sup> Abdul Hakim dan Atang, *op.cit.* h.172

<sup>54</sup> Juhaya S. Praja, *loc.cit.*

secara perorangan. Kedua, milik bersama atau milik umum yang bersifat hak Allah (*haqqullah*). Benda atau hak milik Allah itu dikuasai oleh pemerintah seperti air, udara, dan kandungan bumi.<sup>55</sup>

Pembiayaan Dana Berputar adalah salah satu produk BSM KCP Buah Batu yang menggunakan akad *musyarakah*, selain menentukan *nisbah* bagi hasil bank juga menentukan *expected return*. *Expected return* dihitung dari total pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah. Di akhir bulan atau periode bank akan melihat penghasilan nasabah, apabila melebihi dari *expected return*, maka kelebihan tersebut menjadi hak bank. Namun sebaliknya, apabila penghasilan kecil di bawah *expected return*, maka nasabah harus membayar kekurangan tersebut.

Dengan demikian, setelah mengetahui proses pelaksanaan akad *musyarakah* dalam produk Pembiayaan Dana Berputar akan dibuat sebuah kesimpulan tentang bagaimana tingkat Harmonisasi antara Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dengan pelaksanaan akad *musyarakah* dalam Produk Pembiayaan Modal Kerja di BSM KCP Buah Batu.

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Untuk dapat mengetahui bagaimana aplikasi produk pembiayaan dana berputar melalui akad *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri, maka penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu, Jl. Buah Batu No 249, Kel

---

<sup>55</sup>*Ibid*,

turangga, kec.Lengkong,Bandung, Jawa Barat. Adapun tahapan-tahapan yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

### 1. Metode Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi kasus. Studi kasus adalah metode penelitian kualitatif yang biasa digunakan dalam penelitian sosial. Ia diharapkan pada suatu penelitian yang intensif terhadap suatu satuan yang intensif terhadap suatu satuan analisis tertentu dan biasanya digunakan dalam penelitian dibidang psikologi, antropologi dan sosiologi (mikro).<sup>56</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji tentang akad *musyarakah* dalam produk Pembiayaan Dana Berputar di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu.

### 2. Jenis Data

Kategori data yang digunakan penulis dalam karya tulis ini adalah data kualitatif. Dalam menganalisis data yang bersifat kualitatif diperlukan langkah-langkah sebagai berikut : (1) proses satuan (*uniting*), (2) kategorisasi, (3) penafsiran.<sup>57</sup>

### 3. Sumber Data

Penentuan sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup>Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Logos, 1999), 57

<sup>57</sup>Moleong. Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h.190

<sup>58</sup>Cik Hasan Bisri, *op.cit.*, h.59

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang ada kaitannya langsung dengan pembahasan dalam skripsi ini. Adapun data tersebut diperoleh dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buah Batu yang merupakan objek penelitian dari penulisan skripsi ini.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku dan sumber lainnya yang menunjang dan berkaitan dengan penelitian ini.

4. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahap antara lain:

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul dari observasi dan wawancara, kemudian diklarifikasi sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Menafsirkan data yang telah terpilih, kemudian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif.
- c. Menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusan masalah yang telah dianalisis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat menentukan kualitas data yang didapat. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena dengan melakukan kegiatan pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak bank (Bank Syariah Mandiri) yang diwakili oleh Bapak Dian Herdiana yang menjabat sebagai Back Office di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buah Batu dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang mendukung dalam penelitian ini.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau *book survey* adalah untuk mencari dan menghimpun konsep-konsep yang ada relevansinya dengan topik penelitian. Artinya studi kepustakaan ini digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data atau teori pada buku yang ada hubungannya dengan masalah yang harus diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian dan melalui tahapan kategorian dan klasifikasi, pencarian antara data yang secara spesifik tentang hubungan antar perubah, diamana diarahkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari teks yang dimuat media masa, terutama surat kabar.<sup>59</sup>

Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu dan sumber data lainnya, penulis dapat mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data;
- b. Mengklasifikasikan data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah;
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan;
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori;
- e. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.

---

<sup>59</sup>Cik Hasan Bisri, *op.cit.*, h.61